

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena disitulah tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah paling besar dan terbukti handal menghadapi guncangan krisis ekonomi.<sup>1</sup>

Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 telah melemahkan hampir seluruh sektor ekonomi yang ada di Indonesia namun, ada sektor yang mampu bertahan menghadapi guncangan dibandingkan dengan usaha besar, yakni sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ini juga sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan juga sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga dari usaha tersebut. UMKM juga mempunyai fleksibilitas jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas besar.<sup>2</sup>

Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya merupakan sektor UMKM. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fungsi utama UMKM dalam penggerak ekonomi Indonesia, yaitu (1) sektor usaha kecil dan menengah sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal, (2) sektor usaha kecil dan menengah mempunyai

---

<sup>1</sup> Rahmawati, dkk. *Bisnis Usaha Kecil Menengah; Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen Pemasaran*. (Yogyakarta: EKUILIBRIA, 2016), h.73

<sup>2</sup> <http://www.usaha-kecil.com>, diakses pada 27 September 2019, PUKUL 19:13 WIB

kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan (3) sektor usaha kecil dan menengah sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.<sup>3</sup>

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia berbentuk UMKM yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan realitas perekonomian Indonesia. Usaha yang dijalankan ini mampu berdiri sendiri tanpa adanya group atau perusahaan yang membawahnya. Dengan demikian modal untuk usaha ini akan sulit mendapatkan pinjaman kredit atau pembiayaan dari bank, dengan kata lain termasuk dalam kategori *unbankable*.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah rata-rata pembiayaan dan NPF berdasarkan jenis penggunaan dan kategori usaha pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2019**

| <b>Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha</b> | <b>2016<br/>(Miliar Rupiah)</b> | <b>2017<br/>(Miliar Rupiah)</b> | <b>2018<br/>(Miliar Rupiah)</b> | <b>2019<br/>(Miliar Rupiah)</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Modal Kerja                             | 64.493                          | 68.870                          | 71.555                          | 75.682                          |
| a. UMKM                                    | 26.871                          | 28.364                          | 28.394                          | 29.881                          |
| NPF  | 1.977                           | 1.692                           | 1.798                           | 1.498                           |
| b. Bukan UMKM                              | 37.622                          | 40.506                          | 43.161                          | 45.801                          |
| NPF  | 2.183                           | 2.459                           | 1.805                           | 1.570                           |
| 2. Investasi                               | 42.856                          | 46.472                          | 47.445                          | 50.460                          |
| a. UMKM                                    | 14.692                          | 15.783                          | 16.553                          | 18.415                          |
| NPF  | 1.438                           | 1.156                           | 929                             | 882                             |
| b. Bukan UMKM                              | 28.164                          | 30.689                          | 30.892                          | 32.046                          |
| NPF  | 1.046                           | 1.841                           | 2.229                           | 1.686                           |
| 3. Konsumsi (Bukan UMKM)                   | 53.878                          | 66.900                          | 74.408                          | 85.992                          |
| NPF  | 1.802                           | 1.425                           | 1.493                           | 1.612                           |
| <b>Total Pembiayaan</b>                    | <b>161.227</b>                  | <b>182.242</b>                  | <b>193.408</b>                  | <b>212.134</b>                  |
| <b>Total NPF</b>                           | <b>8.446</b>                    | <b>8.574</b>                    | <b>8.253</b>                    | <b>7.248</b>                    |

Sumber: www.ojk.go.id. Diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 10:44 WIB.

<sup>3</sup> Luluk Chorida, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Pada Bank-Bank Syariah DI Indonesia)", (Skripsi, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), h.1

Secara garis besar jumlah rata-rata pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2019 terus menerus mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,21% begitupun pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 0,11% dan pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 0,18%. Dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan sebesar 0.50%.

Permodalan untuk UMKM menjadi kunci permasalahan, sebagai penggerak perekonomian di Indonesia UMKM perlu diberikan dukungan agar tetap berjalan, dukungan dalam segi permodalan yang berupa pembiayaan untuk UMKM. Dengan adanya pembiayaan UMKM ini diharapkan UMKM dapat berkembang dengan maksimal karena telah didukung dalam segi permodalan.

Dana yang disalurkan pembiayaan UMKM ini berasal dari bank itu sendiri, dengan demikian bank harus menghipun dana yang cukup untuk memenuhi penyaluran pembiayaan UMKM. Sebagai lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Salah satu dana yang diterima adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bersumber dari masyarakat dan berasal dari tabungan, deposito dan giro.<sup>4</sup> Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat baik berskala kecil maupun besar.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Cahya Masturina Citra, Pengaruh NPF, DPK, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada BPRS di Indonesia, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), h. 6

<sup>5</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 133

Bank menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian dihimpun (dana pihak ketiga) dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana pihak ketiga yang disalurkan ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembiayaan khususnya untuk UMKM yang terkendala dalam segi permodalan. UMKM yang membutuhkan dana akan mendapatkan pembiayaan sedangkan untuk bank sendiri akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari dana yang disalurkan tersebut, hal tersebut akan menggerakkan UMKM sebagai penggerak perekonomian di Indonesia.

Untuk menyalurkan pembiayaan perlu diperhatikannya rasio keuangan pada bank tersebut, rasio yang berkaitan dengan DPK salah satunya yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah perbandingan pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh bank. FDR berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan yang berasal dari dana pihak ketiga.

Sebagai indikator dalam menilai tingkat efektivitas perbankan dalam menyalurkan pembiayaan digunakan rasio *Financing to Deposit Ratio*. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Didin Rasyidin Wahyu, "Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Bank BJB Syariah Cabang Serang)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1 (2016), h. 22

Selain FDR, hal yang perlu diperhatikan kembali dalam penyaluran pembiayaan yaitu tingkat inflasi. Indonesia sebagai negara yang berkembang masalah umum yang sering dihadapi oleh negara yang berkembang adalah inflasi. Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang di dalamnya termasuk perbankan sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian negara yang cenderung digambarkan dalam bentuk inflasi.

Inflasi (*inflation*), yaitu kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus-menerus, memengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah.<sup>7</sup> Penyebab kenaikan tingkat inflasi terjadi karena tingkat harga dan uang beredar secara umum naik bersamaan. Kenaikan uang yang beredar secara terus-menerus menjadi faktor penting yang dapat menyebabkan kenaikan tingkat harga secara terus-menerus, yang kita sebut sebagai inflasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pembahasan ini menarik untuk diangkat dan dikaji dengan penelitian dengan tema FDR, dan inflasi terhadap UMKM, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR), DAN INFLASI TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2016-2019”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, dan Pasar keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) h. 13

1. Pengaruh FDR terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada bank umum syariah tahun 2016-2019
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada bank umum syariah tahun 2016-2019
3. Pengaruh Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada bank umum syariah tahun 2016-2019
4. Pengaruh tingkat margin terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada bank umum syariah tahun 2016-2019
5. Pengaruh NPF terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada bank umum syariah tahun 2016-2019

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan yaitu meliputi pengaruh FDR, dan inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM. Kemudian yang menjadi objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS).

### **D. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh FDR terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2019?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2019?

3. Bagaimana pengaruh FDR dan inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2019?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh FDR terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh FDR dan inflasi terhadap penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2019.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan UMKM, baik dari segi dana yang diperoleh oleh pihak bank, FDR dan tingkat inflasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk Bank Umum Syariah dalam mengelola dana masyarakat yang disalurkan pada

usaha-usaha produktif yang akan memberikan keuntungan bagi pihak bank syariah dan juga masyarakat.

## 2. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang ada dalam perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya tentang FDR, Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan UMKM.

## 3. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ini melakukan penelitian pembiayaan UMKM dengan variabel yang berbeda.

## **G. Kerangka Berpikir**

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik bersekala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau tidak berfungsi sama sekali.<sup>8</sup> Dana masyarakat merupakan sumber dana utama bagi suatu bank, mengingat dana masyarakat ini merupakan bagian terbesar dari seluruh sumber dana yang diperoleh bank.

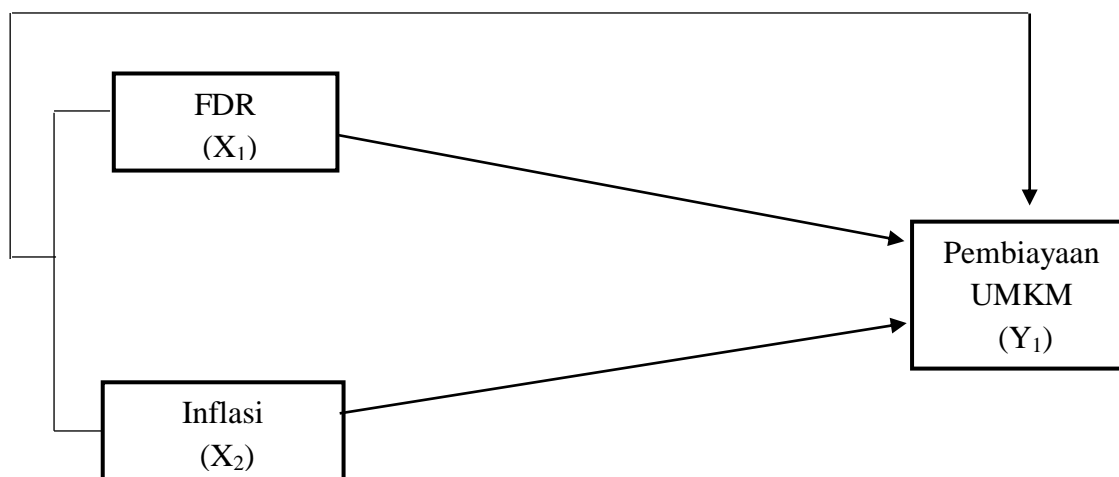
---

<sup>8</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ..., h. 114



Efektifitas sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga memediasi dapat dilihat dari *Financing to Deposit Ratio* bank tersebut. FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk menguUMKM sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas tersebut.<sup>9</sup> Kerangka pemikiran ini, meliputi FDR (variabel  $X_1$ ), inflasi (variabel  $X_2$ ), dan UMKM (variabel  $Y_1$ ). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan dengan menggunakan grafik kerangka pemikiran.

**Gambar 1.1**  
**Grafik Kerangka Berpikir**



#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis yang secara garis besar terdiri dari:

---

<sup>9</sup> Sumiyati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2017" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h. 17

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan telah pustaka yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan UMKM. Kajian teori berupa pemaparan UMKM, FDR, inflasi serta teori yang dibangun untuk pengembangan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, teknis analisis data dan hipotesis statistik.

**BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Merupakan deskripsi hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini menggambarkan secara umum tentang objek penelitian seperti tentang sejarah singkat, perkembangan serta pertumbuhan FDR, Inflasi, dan Pembiayaan UMKM yang menjadi objek dalam penelitian ini, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan masukan berdasarkan temuan dari hasil penelitian.